

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui program bantuan sosial bersyarat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu guna meningkatkan kualitas hidup mereka.¹

PKH pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Program ini menargetkan keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga rentan, seperti ibu hamil, anak usia dini, dan lansia. Melalui bantuan tunai bersyarat, PKH bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku positif dalam hal pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial.

Pelaksanaan PKH di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada konteks lokal dan efektivitas implementasi program. Beberapa studi menunjukkan bahwa PKH berhasil meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Namun, tantangan seperti ketepatan sasaran,

¹ Raudhotul Jannah, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur, Skripsi, UIN Jakarta, 2019.

keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan PKH di tingkat lokal menjadi penting untuk memahami efektivitas program dan perbaikan yang diperlukan.²

Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi implementasi PKH. Sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang signifikan, pelaksanaan PKH di Desa Kaliasin menjadi menarik untuk dikaji. Studi kasus di desa ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana PKH dijalankan di tingkat desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Desa Kaliasin dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek seperti mekanisme pelaksanaan, peran pendamping sosial, partisipasi masyarakat, serta perubahan yang terjadi pada keluarga penerima manfaat. Dengan pendekatan kualitatif, data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas PKH di tingkat lokal.³

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat dan teori perubahan sosial. Pemberdayaan masyarakat

² Nova Abizal, Maimun dan Yulindawati, efektivitas program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat masa pandemi covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya), jurnal ilmiah basis ekonomi dan bisnis volume 1, NO. 1, 2022

³ Sulfadli, Gita Susanti, Muh. Tang Abdullah, Nelman Edy, Rizal Pauzi, evaluasi dampak program: studi kasus program keluarga harapan (pkh) di kabupaten enrekang, Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 3 Issue 1, June 2023

menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri. Sementara itu, teori perubahan sosial melihat bagaimana intervensi program dapat mempengaruhi struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis pelaksanaan PKH akan mempertimbangkan aspek struktural dan kultural yang mempengaruhi hasil program.⁴

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Pendamping sosial berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga penerima manfaat memahami dan memenuhi syarat program. Namun, keterbatasan jumlah pendamping dan beban kerja yang tinggi seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, dukungan dan pelatihan bagi pendamping sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan PKH.⁵

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program juga menentukan efektivitas PKH. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Namun, rendahnya tingkat literasi dan pemahaman terhadap program seringkali menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan edukasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Desa Kaliasin, faktor-faktor lokal seperti budaya, struktur sosial, dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan

⁴ Nur Haliza; Dwi Amalia Chandra Sekar, supervisor; Sofyan Cholid, examiner; Arif Wibowa., Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sebagai bentuk pemberdayaan perempuan (studi kasus di PKH Jakarta Selatan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019.

⁵ Raudhotul Jannah, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur, Skripsi, UIN Jakarta, 2019.

PKH. Misalnya, norma-norma budaya tertentu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bantuan sosial dan partisipasi dalam program. Selain itu, struktur sosial yang hierarkis dapat mempengaruhi distribusi informasi dan akses terhadap program. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks lokal menjadi penting dalam merancang dan melaksanakan program yang efektif.

Evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Kaliasin juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan program. Keberlanjutan tidak hanya terkait dengan pendanaan, tetapi juga dengan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan perubahan positif yang telah dicapai. Oleh karena itu, integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya dapat meningkatkan keberlanjutan hasil program. Selain itu, penguatan kelembagaan lokal juga penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Dalam penelitian ini, indikator kesejahteraan masyarakat akan diukur berdasarkan perubahan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Perubahan dalam aspek-aspek tersebut dapat mencerminkan dampak langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan PKH. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap program juga akan dianalisis untuk memahami tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap program. Dengan demikian, evaluasi akan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pendamping sosial, dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai pelaksanaan program

bantuan sosial di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis dan akademis yang signifikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Desa Kaliasin merupakan studi kasus yang relevan untuk memahami dinamika pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan PKH. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial. Akhirnya, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima PKH melalui program Keluarga Harapan PKH pada masyarakat di desa kaliasin kecamatan sukamulya kaabupaten Tangerang. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah yang dapat diambil dasar penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat penerima manfaat (PKH) di Desa Kaliasin Kecamatan. Sukamulya Kabupaten Tangerang-Banten?
2. Bagaimana dampak program keluarga harapan di Desa Kaliasin tepat sasaran atau tidak dan sesuai persyaratan penerima manfaat atau tidak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan program tersebut dalam mensejahterakan masyarakat penerima manfaat (PKH).
2. Untuk mengetahui hasil program keluarga harapan (PKH) tepat sasaran atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari peneliti sendiri ialah :

1. Manfaat teoritis:

Pengurangan Kemiskinan: PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin secara langsung. Ini mendukung teori bahwa intervensi langsung melalui transfer tunai kepada keluarga miskin dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

2. Manfaat praktis:

Penanggulangan Kemiskinan Jangka Pendek: PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin secara langsung, yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini membantu mengurangi tekanan keuangan pada keluarga miskin dan memperbaiki kesejahteraan segera.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang dibuat oleh peneliti ini adalah pencarian penelitian sebelumnya atau artikel penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertugas untuk menghindari duplikasi, plagiarisme, pengulangan serta untuk memastikan keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan di atas dan hasil yang diperoleh peneliti, serta sebagai pedoman penelitian selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang valid dan replikasi untuk memastikan keaslian dan legitimasi penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran, sejauh ini terdapat beberapa hasil penelitian peneliti terdahulu yang mirip dengan penelitian yang dilakukan, maka hasil yang relevan adalah sebagai berikut:

Skripsi Anal Fikri Aristo berjudul “Peran Industri Dalam Negeri Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus Desa Sapit Kabupaten Suela), meskipun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pran Hom dalam meningkatkan kesejahteraan industri masyarakat kampung sapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Mengenai hasil penelitian begitulah yang dilakukan bahwa ada tiga bentuk industri rumah tangga di desa Sapit. Kemudian peran *home industri* dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Sapit sangat penting karena mereka bisa membuka diri lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini, Persamaan juga membahas kesejahteraan finansial dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada upaya yang dilakukan dalam eksekusi.⁶

⁶ Anal Fikri Aristo, “Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela” (UIN Mataram, n.d.).

Skripsi Erni Risnawat “Masalah Program Keluarga Harapan untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat miskin NTB (Studi kasus Kecamatan Lembar, Kegubernuran Lombok Barat) “Tujuan dari studi ini adalah Mendeskripsikan permasalahan pelaksanaan PKH di kabupaten Halaman Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun metodenya studi yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa program keluarga layak secara finansial tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di kabupaten tersebut Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kemiripannya sama mari kita bahas PKH. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian.⁷

Skripsi Nurrahmania berjudul “Revisi Hukum Ekonomi Syariah Perhetoivo terhadap kebijakan janji kartu program (PKH) di Desa Simpsai, Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu” Mengenai tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara berolahraga Pegadaian kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di subdivisi simpasai, kecamatan woja, kabupaten dompu. Adapun metodenya menggunakan ilmuwan, yaitu metode penelitian, dalam penelitian ini kualitas Hasil penelitian membuktikannya Laksanakan ikrar dari kartu Program Keluarga Harapan (PKH). review hukum keuangan syariah oleh masyarakat Ruas Simpasai diperbolehkan karena sudah terisi penuh ketentuan tentang jangka waktu dan uang yang harus dibayar sebelum membuat kebijakan janji, jelas ke mana harus meminjam, Kedua belah pihak menentukan periode pengembalian yang dikutip. Paralel dari penelitian ini adalah sama membahas program keluarga harapan (PKH). perbedaannya terletak pada fokus penelitian.⁸

⁷ Erni Risnawati, “Problematika Program Keluarga Harapan Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Ntb” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁸ Nurrahmania, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menggaldaikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Simpsai Kecamatan Wojo Kabupaten Dompu” (UIN Mataram, 2020).

Jurnal Khairuman Satriawan, berjudul “Upaya Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha milik desa (BUMS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah tersebut BUMDES meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sesela Kecamatan Gunungsar, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES mengalami kemajuan bersama-sama membawa manfaat penting hadirin Persamaan dalam penelitian ini sama-sama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan perbedaannya untuk menemukan di badan atau lembaga yang ada tempat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.⁹

Jurnal Nurkhairiyah dan Kunart berjudul “Pemberdayaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) (KPM) di Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisinya Peserta PKH sebelum dan sesudah wisuda dan mencari formulir Wewenang peserta PKH. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasilnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan proses pemberdayaan yang diterapkan Fasilitator PKH pada pertemuan rutin bulanan. membantu dalam bentuk penyediaan bahan baku. Bahan no banyak bantuan yang diterima, tetapi bantuan diberikan dengan cuma- cuma melanjutkan Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama memperlakukan PKH, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹⁰

⁹ Khairuman Setiawan, “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa(BUMDES),” *Jurnal Social, Jurusan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2019): 29.

¹⁰ Nurkhairiyahkunarti, “Bentuk Pemberdayaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan(PKH) Di Kabupaten Patih,” *Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 2 (2019): 143.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari program-program dan layanan sosial yang bertujuan membantu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memperbaiki kualitas hidup mereka. Pandangan ini dikemukakan oleh Edi Suharto, yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat bantuan karitatif, melainkan juga menyangkut pemberdayaan sosial secara berkelanjutan.¹¹ Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat relevan karena menyentuh langsung akar masalah kemiskinan struktural dan keterbatasan akses layanan publik. Oleh sebab itu, teori ini mendasari berbagai kebijakan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Jaminan Sosial Nasional.

Dalam praktiknya, kesejahteraan sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, dan kesenjangan akses layanan sosial di berbagai daerah. Tomi Agus Triono melalui studi literatur sistematis menyoroti bahwa meskipun terdapat peluang seperti pertumbuhan ekonomi dan reformasi kebijakan, masih banyak hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif.¹² Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

¹¹ E. Suharto. "Kebijakan sosial: Sebagai Respons Terhadap Masalah Dan Agenda Kesejahteraan Sosial" Bandung: Refika Aditama. 2009. H.60

¹² Triono, T. A. (2023). Peluang dan tantangan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia: Kajian sistematik. *Jurnal Sosial Budaya*, 4(1), 40–52.

implementasi teori kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi.

Peran masyarakat dalam sistem kesejahteraan sosial juga sangat penting. Asyhabuddin menekankan konsep *welfare society*" di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial.¹³ Pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dapat lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, teori kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai lokal, tantangan struktural, dan adaptasi konsep global. Yusuf Effendi menekankan bahwa ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia bersifat adaptif dan perlu terus dikembangkan melalui indigenisasi dan spesialisasi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa teori kesejahteraan sosial harus terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia.

b. Pendekatan Teori Kesejahteraan Sosial

Terdapat tiga pendekatan utama dalam teori kesejahteraan sosial, yaitu residual, institutional, dan developmental. Pendekatan residual berpandangan bahwa intervensi sosial hanya dilakukan

¹³ Asyhabuddin. (2022). Pengembangan konsep welfare society di Indonesia. *ICODEV: Journal of Islamic Community Development*, 7(1), 60–72.

¹⁴ Effendi, Y. *Indigenisasi dan spesialisasi ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia*. Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1(1), 2020. 1–15.

ketika keluarga atau pasar gagal memenuhi kebutuhan individu; pendekatan ini bersifat minimalis dan sering digunakan di negara liberal.¹⁵ Sementara itu, pendekatan institusional melihat kesejahteraan sosial sebagai fungsi normal dari negara yang harus hadir secara permanen untuk memenuhi hak warga negara tanpa diskriminasi. Pendekatan ketiga, yaitu *developmental* (yang banyak dikembangkan oleh Midgley), menekankan keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, yang menekankan keadilan sosial, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).¹⁷ Oleh karena itu, teori kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi landasan akademik, tetapi juga panduan normatif bagi perumusan dan implementasi kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan, miskin, dan marginal.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah menerapkannya. Program yang sama dan yang telah dilakukan cukup sukses di beberapa negara yang dikenal dengan *Transfer Tunai*

¹⁵ Triono, T. A. (2023). Peluang dan tantangan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia: Kajian sistematis. *Jurnal Sosial Budaya*, 4(1), 2023. 40–52.

¹⁶ Husna, N. *Ilmu Kesejahteraan Sosial: Konsep, Teori, Metode Dan Paradigma*. Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1), 2017. 70–90.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Bersyarat (CCT) atau Hibah Tunai Bersyarat. PKH tidak cukup untuk program bantuan keuangan langsung (BLT) diberikan untuk membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli mereka jika pemerintah melakukannya penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara lain, programnya sangat mirip Terutama bagi keluarga yang menderita kemiskinan kronis. Namun Tujuan PKH adalah untuk menghilangkan kemiskinan itu sendiri adalah tujuan jangka panjang yang layak dicapai. Ini bukan berarti tujuan jangka panjang itu tidak ada gunanya, PKH dapat mencapai tujuan ini jika dilakukan bersama-sama. Itu harus program nyata lainnya untuk pengentasan kemiskinan bersifat memberdayakan agar kondisi keberdayaan masyarakat dapat tercapai.¹⁸

PKH adalah suatu program yang membantu keuangan langsung kepada keluarga sangat miskin, jika mereka memenuhi persyaratan usaha peningkatan kemiskinan. PKH pun memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan diberikannya peningkatan kualitas terhadap masyarakat sekaligus didukung untuk pertumbuhan yang relatif kurang kesejahteraan.¹⁹

3. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Edi Suharto, kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara material maupun non-material, dan memiliki kualitas hidup yang layak. Kesejahteraan tidak hanya

¹⁸ Syahputra Adisanjaya, "Program Keluarga Harapan (PKH) : Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan," *Prosiding KS:Riset &PKM* 4, no. 1 (2019): 90.

¹⁹ Kadek Dina Indriani, "Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikecamatan Buleleng Tahun 2011- 2015," *E-Journal Jurusan Pendidikan Ekonomi* 10, no. 2 (2017): 3.

diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keberfungsian sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari kebijakan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus selalu memperhatikan dimensi sosial masyarakat.²⁰

Definisi kesejahteraan di dunia modern adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan air minum bersih dan bisa berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bisa dapat pekerjaan yang cukup yang bisa mendukung kualitas hidup dan lainnya.

Kesejahteraan merupakan tatanan kehidupan dan kehidupan sosial material dan spiritual, penuh rasa berguna, kesopanan dan kedamaian batin yang mungkin bagi semua orang warga negara harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial mereka yang terbaik mereka sendiri, keluarga mereka dan masyarakat melindungi hak-hak mereka.

Kesejahteraan adalah berbagai kepuasan yang dicapai tetapi orang tentang hasil konsumsi dari pendapatan yang diterima tingkat kesejahteraan itu sendiri adalah sesuatu yang relative karena tergantung pada besarnya kepuasan yang diterima hasil konsumsi pendapatan. Hubungan antar konsep-konsep kesejahteraan dan kebutuhan harus dipenuhi kebutuhan tersebut, maka seseorang dianggap kaya, karena tingkat kebutuhan secara implisit diurutkan indikator kesejahteraan.

²⁰ E. Suharto. "Kebijakan sosial: Sebagai Respons Terhadap Masalah Dan Agenda Kesejahteraan Sosial" Bandung: Refika Aditama. 2009. H.60

Pengertian kesejahteraan hukum adalah pengaturan material dan spiritual kehidupan sosial dan mata pencaharian dikelilingi oleh rasa aman, kesopanan dan kedamaian batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk melakukan bisnis memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial bukan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang mendukung Hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia menurut pancasila. Wellness merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk dijaga dan mempromosikan stabilitas sosial dan ekonomi jika kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Jadi itu untuk masing-masing miliknya butuh kondisi kaya, baik kaya materi dan penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat.²¹

4. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang "bergaul" atau secara ilmiah "berkomunikasi" satu sama lain. Manusia mungkin memiliki infrastruktur yang memungkinkan warganya untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, negara modern adalah entitas manusia dengan berbagai infrastruktur yang memungkinkan interaksi antar warga negara secara intensif dan sering. Negara modern memiliki jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan kereta api, jaringan lalu lintas udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio-televisi, berbagai surat kabar tingkat nasional, sistem upacara hari jadi nasional, dll. . Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil dapat berinteraksi lebih intensif dibandingkan dengan negara dengan wilayah geografis yang sangat

²¹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonom*. "Islam Dan Pembangunan Ekonomi", (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). HLM 24.

luas.

Adanya infrastruktur untuk komunikasi menyebabkan penduduk saling berkomunikasi secara kelompok. Di sisi lain, andai saja keberadaan kesempatan untuk berinteraksi tidak berarti bahwa warga negara dari orang yang benar-benar berkomunikasi. sesuatu kelompok etnis seperti Bali memiliki potensi dalam interaksi yaitu bahasa Bali. Namun, keberadaan potensi ini tidak menyebabkan ini pada semua orang Bali tanpa alasan mengembangkan kegiatan yang mengarah pada komunikasi interaktif intens di antara semua orang Bali di masa lalu. mereka yang berhubungan atau berkomunikasi membentuk komunitas untuk sesuatu masyarakat harus memiliki ikatan khusus lainnya.

Meskipun terkadang mereka juga berkomunikasi dengan cara yang terbatas, tidak dia memiliki ikatan lain selain ikatan perhatian tanaman obat Saat orang banyak menonton pertandingan sepak bola dan bahkan semua kelompok massa mana pun yang tidak disebut masyarakat. Di sisi lain, kami menggunakan istilah kerumunan untuk merujuk pada sekelompok orang. di dalam Di Inggris, istilah crowd digunakan.

Ikatan yang menyatukan orang-orang masyarakat adalah pola perilaku umum untuk semua faktor kehidupan dalam kesatuan ini. Harus ada pola halus dan berkesinambungan, yaitu pola khas telah menjadi tradisi khusus. Penginapan kemudian siswa, akademi layanan atau sekolah, kita tidak bisa untuk menyebut masyarakat karena meskipun orang yang bersatu terdiri dari siswa, guru, administrator dan staf lainnya yang terlibat dan sesuai dengan standar dan aturan sekolah yang berbeda lain, tetapi sistem yang biasa hanya mencakup beberapa sektor kehidupan yang terbatas Sementara

seseorang Asrama atau sekolah hanya sementara, jadi tidak ada kesinambungan.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami hidup bersama dengan orang lain. Adapun Masyarakat terbagi dalam beberapa jenis seperti ; masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat madani dan lain-lain. Walaupun masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi sifat masyarakat tetap tidak berubah menurut definisi secara umum.²²

5. Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah kelompok penduduk yang hidup dalam kondisi kekurangan secara ekonomi dan sosial, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan dasar lainnya. Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya, rendahnya kualitas hidup, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan ekonomi maupun sosial.²³ Dalam konteks kebijakan di Indonesia, masyarakat miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan mandiri, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013.²⁴

Selain itu, kemiskinan juga dipandang sebagai kondisi multidimensional yang berkaitan erat dengan faktor struktural, seperti

²² Dedeh Maryani and Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman: Deepublish, 2019).

²³ E. Suharto. "Kebijakan sosial: Sebagai Respons Terhadap Masalah Dan Agenda Kesejahteraan Sosial" Bandung: Refika Aditama. 2009. H.60

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin

pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan lemahnya perlindungan sosial.²⁵ Banyak dari masyarakat miskin yang hidup dalam kondisi rentan akibat faktor geografis, sosial, atau budaya—misalnya tinggal di wilayah terpencil, bekerja di sektor informal, atau mengalami diskriminasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya berupa bantuan langsung, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur sosial secara berkelanjutan.²⁶ Memahami definisi masyarakat miskin secara menyeluruh sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Sebagaimana penelitian lapangan maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil data secara langsung dilapangan terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran atau obyek penelitian dibatasi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran pembahasan. Metode penelitian ini percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi

²⁵ Bappenas. “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.” Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2010)

²⁶ Husna, N. *Ilmu Kesejahteraan Sosial: Konsep, Teori, Metode Dan Paradigma*. Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1), 2017. 70–90.

sosial kesejahteraan mereka.²⁷

Berdasarkan pada penelitian kualitatif data hasil penelitian pada masyarakat desa kaliasin akan disajikan dalam bentuk narasi dengan gaya penelitian induktif dan dianalisis respon-respon individu yang menjadi stakholder penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan menggambarkan sebagaimana adanya tanpa diiringi dengan alasan, pandangan atau analisa dari penulis itu sendiri.²⁸

Didalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan keadaan objek, yakni tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disini digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dari objek penelitian, dimana dengan pengumpulan data yang didapat dari objek penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan penulis adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.²⁹ Dalam observasi ini peneliti memakai observasi non-partisipan yaitu suatu

²⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

²⁸ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997).

²⁹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

proses dimana observer tidak ikut dalam kehidupan yang diobservasi. Maka dalam observasi nonpartisipan penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi yang penulis lakukan meliputi, pertama observasi tempat (plece) yaitu di desa kaliasin, kedua observasi orang-orang yang mendapatkan Program Keluarga Harapan, ketiga observasi kegiatan seperti pendampingan serta penyuluhan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode interview mencangkup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadap muka dengan orang tersebut.³⁰

Penulis menggunakan teknik interview dengan jenis interview bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara menggunakan pedoman yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.³¹

Dalam hal ini, interview bebas terpimpin digunakan kepada seluruh sample yang sudah penulis tentukan untuk mengetahui ide-

³⁰ Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramdia Pustaka, 2008).

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach, Cet. II* (Bandung: Masdar Maju, 1996).

ide, gagasan, dan juga pengalaman dari objek yang akan diteliti. Metode interview ini sangat penting untuk mendapat informasi yang dibutuhkan sehingga data yang akurat dalam penelitian ini dapat diperoleh, yakni pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kaliasin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode ini merupakan penunjang karena untuk menunjang data yang diperoleh dari metode interview dan observasi. Penulis menggunakan metode ini agar dapat menemukan data yang berkenaan dengan profil Desa.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab berisi sub bab pembahasan yang memiliki korelasi antara bab dengan sub bab satu dengan yang lain, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini mendeskripsikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tela'ah Pustaka, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan, dan daftar Pustaka.

BAB II: Kondisi Objek Penelitian

Pada Bab II Dipaparkan Data dan informasi tentang lokasi/subjek/objek penelitian.

BAB III DAN IV Hasil Penelitian

pada Bab ini mendiskusikan dan menjawab rumusan masalah penelitian. Masing-masing rumusan masalah dijawab dalam 1 bab.

BAB V : Penutup

Pada Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran yang dinyatakan secara terpisah.

